

**PERLAWANAN TERSELUBUNG DI TENGAH REGRESI DEMOKRASI
(STUDI KASUS MURAL JALANAN DI KOTA SOLO DAN YOGYAKARTA)**

Rashida Indira Prasanti
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Social, political, economic, and cultural dynamics, which remain to be interesting topics for discussion until now, have become one of the things that have received lots of public attention. People who should be the highest authority in a democratic country are competing to exercise their right to freedom of opinion and voice through various channels, including non-formal political channels using street art. The existence of street artists who are increasing every time adds to the understanding for the community that the definition of art is not only for art but also as art for politics. Using qualitative research methods with new social movement theory and the concept of covert resistance, this paper will reveal the results of an analysis of how murals that are included in street art play their function as covert resistance and media criticism, and what is the role of the state and apparatus in protecting freedom of opinion and expression of society . The results of the study show the fact that street murals exist because street artists who are also civil society voice their concerns and are relevant to many people in the situation that was happening at that time, and basically there are still difficulties for the political domination in accepting the presence of street art as one of the medium of resistance and criticism.

Keywords : *mural art, art for politics, covert resistance, political participation.*

PENDAHULUAN

Dinamika sosial, politik, ekonomi, hingga budaya masih menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan hingga saat ini, ditandai dengan berbagai respon dan kritik sebagai wujud dari adanya aspirasi masyarakat. Aspirasi oleh masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan adanya kehidupan yang lebih komunikatif dan argumentatif sehingga diharapkan dapat membantu perkembangan isu atau situasi

yang sedang terjadi untuk kemudian diketahui lebih banyak pihak.

Aspirasi yang berwujud komunikasi visual menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat selaku responden atau penikmat seni visual tersebut. Beberapa waktu terakhir ini, media penyaluran aspirasi tidak hanya terbatas pada media cetak dan elektronik saja, tetapi juga menggunakan seni jalanan sebagai medium untuk menyampaikan respon, kritik, hingga keluhan yang

dirasakan oleh masyarakat terhadap situasi yang terjadi.

Seni mural menjadi salah satu dari cabang seni jalanan yang digunakan untuk mengungkapkan ekspresi individu atau kelompok ke dalam ruang publik. Dalam memproduksi karyanya, seniman jalanan dilandasi oleh sesuatu yang dilihat mereka secara umum, seperti fenomena sosial atau peristiwa yang dianggap menyinggung permasalahan di negara.

Mural adalah salah satu bentuk karya seni yang umumnya menggunakan tembok jalanan sebagai media visualisasi utamanya. Seni mural tidak hanya menonjolkan sisi estetika dan keindahannya saja, tetapi melalui mural juga dapat digunakan sebagai media kritik dan protes mengenai isu sosial, ekonomi, budaya, hingga politik. Berbagai pesan yang terkandung di dalam mural yang bermaknakan kritik diartikan sebagai protes terhadap realitas sosial dan mencerminkan upaya perlawanan terhadap arogansi kekuasaan.

Eksistensi mural di Indonesia sudah lahir pada periode revolusi tahun 1945 hingga 1949 oleh masyarakat yang menyuarakan protesnya terhadap kembalinya tentara NICA ke Indonesia. Dewasa ini, seni mural semakin dikenal

eksistensinya oleh publik dan mendapat berbagai dukungan. Karya seni di ruang publik yang awalnya hanya berupa seni visual yang ditujukan sebagai penghias tembok jalanan berubah maknanya menjadi salah satu alat dan media untuk melakukan protes terhadap situasi sosial dan politik dengan mudahnya ditemui di berbagai wilayah di Indonesia.

Lukisan mural yang bermaknakan kritik dan protes yang seringkali direpresi oleh aparat setempat memunculkan tanda tanya besar di benak masyarakat akan di mana letak hak dan kebebasan mereka sebagai warga negara. Setidaknya sebesar 52,1% masyarakat Indonesia menyetujui bahwa ancaman kebebasan sipil meningkat yang menyebabkan adanya ketakutan untuk berpendapat dan berekspresi yang seharusnya dapat dilakukan di negara dengan sistem demokrasi ideal (LP3ES, 2021).

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di tahun 2019, setidaknya terdapat beberapa pola teror terhadap pelaku pengkritik pemerintah dengan lebih dari 200 aksi teror. Di antaranya meliputi pembatasan aksi dan intimidasi, peretasan data pribadi, pembubaran secara paksa, teror dan penculikan, tindakan kekerasan, hingga

penghalangan pendampingan hukum (YLBHI, 2019).

Penghapusan mural jalanan bernada kritik terhadap pemerintah secara masif terjadi di Kota Solo dan Yogyakarta. Pembungkaman suara oleh pemerintah terhadap masyarakat ini menunjukkan bahwa adanya regresi demokrasi di Indonesia. mural “Bangkir Melawan atau Tunduk Ditindas” di Yogyakarta, hingga mural “Berani Membatasi, Harus Menghidui. #GWSIndonesia # Bansos?” di Solo menjadi dua di antara sekian banyaknya kasus sempitnya ruang berekspresi dan bersuara masyarakat hingga selalu dibatasi, bahkan pelukisnya pun diburu polisi.

Pemerintah Kota Solo dan Yogyakarta menyediakan beberapa ruang untuk mengekspresikan seni mural yang berisikan berbagai tujuan dan arti. Sebagai contoh di Solo, terdapat di sepanjang Koridor Gatot Subroto dan Parapet Sungai Bengawan Solo. Sementara di Yogyakarta, terdapat di Kampung Patehan. Walaupun begitu, beberapa mural yang digambar di tempat yang sudah disediakan oleh aparat setempat dihapus karena dinilai provokatif dan dapat mengundang antipasti masyarakat apabila dibiarkan.

Diskursus hubungan antara mural jalanan sebagai media masyarakat untuk menyuarakan protes terhadap situasi dan realitas yang ada dengan politik dan pemerintah tidak akan berakhir hingga sistem demokrasi kembali di evaluasi. Masyarakat memilih menggunakan seni jalanan sebagai aksi perlawanan terselubung yang tidak akan mengubah keadaan dan memberikan perubahan secara instan, namun sekadar untuk mengkritisi situasi dan kondisi yang terjadi serta memobilisasi opini publik terkait realitas sosial yang ada.

Penelitian ini berfokus untuk meneliti dan menganalisis bagaimana mural jalanan memainkan fungsi sebagai medium perlawanan terselubung yang bertujuan untuk membuka perspektif baru bagi pembaca mengenai paradoks antara pernyataan pemerintah yang menyatakan terbuka terhadap kritik, namun terus mempersempit saluran demokrasi dan membungkam ruang berekspresi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berlokasi di Kota Solo dan Yogyakarta dengan melakukan wawancara kepada 4 subjek, antara lain Young Surakarta dan Kinky Twenty selaku

seniman jalanan di Kota Solo dan Yogyakarta; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Semarang; dan Ditsamapta Polda Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Solo dan Yogyakarta yang dikenal sebagai kota seni memiliki seniman-seniman baik individu maupun komunitas yang bergerak di bidang seni jalanan. Bagi para seniman jalanan, seni jalanan tidak hanya berbicara dan memiliki fungsi sebagai penghias ataupun bersifat estetika saja, melainkan sebagai media kritik masyarakat. Bagi seniman mural, berbagai pesan yang disampaikan melalui mural merepresentasikan gejala sosial yang terjadi di sekeliling masyarakat.

Di Kota Solo dan Yogyakarta, banyak dijumpai karya mural yang berada di lokasi legal yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat antara lain seperti di Jl. Gatot Subroto, Jl. Slamet Riyadi, dan Jl. Ir. Juanda di Solo, serta Utara Tugu Jogja dan Kampung Tamansari di Kota Yogyakarta. Munculnya beberapa mural yang berisikan kritik dan portes masyarakat terhadap

pemerintah di beberapa titik di Kota Solo dan Yogyakarta bukanlah semata-mata tanpa alasan. Terdapat berbagai aspirasi yang ingin disampaikan oleh publik mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, namun sistem penyampaian aspirasi formal di sektor pemerintah tidak berjalan dengan baik sehingga publik membutuhkan saluran lain untuk menyuarakan pendapatnya.

Selama ini, politik hanyalah sebuah alat yang digunakan oleh para politisi dan pemangku jabatan untuk membujuk dan mempersuasi masyarakat dengan ucapan manis dan iming-iming semu hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam hal ini, Kinky Twenty, seorang seniman yang berasal dari Yogyakarta menggunakan seni mural sebagai sebuah alat perlawanan untuk memberikan kesadaran politik bagi masyarakat agar tidak mudah terbujuk rayu oleh janji manis para politisi yang selama ini dirasa tidak pernah ditepati sepenuhnya oleh mereka yang berkuasa (*Wawancara, Kinky Twenty, 14 November 2022*).

Realitas yang terjadi di Kota Solo dan Yogyakarta, proses kreasi mural tidak seluruhnya merupakan upaya mandiri warga atau seniman jalanan semata. Komunitas kreatif yang berdomisili di kampung kota bekerja sama dengan komunitas kreatif di

berbagai daerah lalu melakukan kreasi bersama. Tak jarang, dalam proses produksi seni mural, terjalin adanya ikatan antara mural sebagai seni publik bersama masyarakat sehingga mural berperan sebagai jembatan aspirasi personal maupun komunal dalam suatu kawasan.

Ditemukan keseragaman pada tema utama yang sering dibawakan atau digambarkan, bermula dari diskusi terkait isu sosial, budaya, dan politik yang terjadi di sekeliling mereka. Baik Kinky Twenty ataupun Young Surakarta menempatkan karya seninya dengan tak jauh dari topik yang sesuai dengan isu yang sedang terjadi (*Wawancara, Young Surakarta & Kinky Twenty, 12 & 14 November 2022*).

Apabila membahas mengenai perlawanan, publik cenderung berpikir bahwa perlawanan selalu dikaitkan dengan pemberontakan dan dilakuka secara terbuka seperti aksi demonstrasi. Faktanya, perlawanan terselubung merupakan bentuk perlawanan yang mulanya tidak disadari oleh kaum elit serta tidak menghasilkan akibat revolusioner. Fenomena mural jalanan sebagai medium untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan tidak hanya memiliki fungsi estetika menunjukkan peran mereka sebagai salah satu bentuk

perlawanan terselubung dengan gerakan yang lebih mengarahkan pada upaya tentang ha katas hidup yang lebih baik.

Mural sebagai bentuk perlawanan terjadi di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh komunitas Gejayan Memanggil yang menyelenggarakan Lomba Dibungkam dengan ratusan seniman jalanan di seluruh Indonesia yang turut berpartisipasi pada kegiatan ini. Ketentuan utama pemenang lomba ini adalah siapa yang paling cepat dihapus aparat, maka merekalah pemenangnya. Puluhan karya mural yang ikut serta beberapa di antaranya sudah dihapus aparat baik secara parsial ataupun keseluruhan.

Kehadiran mural, selain sebagai suatu medium perlawanan, dianggap sebagai pengisi kekosongan partisipasi politik masyarakat yang tidak terakomodir melalui saluran politik formal seperti partai politik atau organisasi masyarakat lainnya. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu solusi dari keterbatasan akses masyarakat ke media konvensional dan digital.

Saat ditanya respon terakit represi mural “Jokowi 404 *Not Found*” yang terjadi di Tangerang 2021 silam dari kacamata seorang *street artist*, Young Surakarta dan Kinky Twenty menyampaikan rasa

kekecewaannya terhadap aparat yang dinilai terlalu sensitive dan agresif dalam merespon suara rakyat. Menurut mereka, salah satu faktor agresivitas yang dilakukan oleh aparat terkait mural Jokowi dan mural-mural bernadakan kritik lainnya tidak lepas dari peran media sosial. Dilansir dari laporan We Are Social, pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 mencapai 88,7% atau sebanyak 191 juta orang.

Banyaknya masyarakat yang memiliki akses ke media sosial mengakibatkan banyaknya seniman jalanan yang turut memanfaatkan hal tersebut dengan mengunggah karya mereka di media sosial untuk menarik perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Hal tersebut pula lah yang menjadi faktor mengapa mural yang memainkan fungsi sebagai perlawanan politik secara sembunyi-sembunyi dapat diketahui dan dihapus oleh aparat.

Meninjau dari berbagai fenomena para seniman mural yang mengekspresikan keresahan mereka atas kejadian dan situasi yang terjadi, Peneliti menemukan fenomena atau kasus yang terjadi karena penyalahrtian aparat terkait seni jalanan yang ada di Yogyakarta dengan penghapusan mural “Dibungkam” yang terjadi di bawah jembatan Kleringan Kewek, Danurejan,

Kota Yogyakarta. Mural tersebut diproduksi pada 21 Agustus 2021 yang kemudian dihapus oleh pihak Satpol PP Kota Yogyakarta. Mural ini diciptakan oleh komunitas Yogya Street Art yang menunjukkan kata satir sebagai representasi mereka dalam menyuarakan kebebasan berekspresi para seniman jalanan di Kota Yogyakarta.

Dimensi penting dan mendasar dalam partisipasi politik pada negara demokrasi adalah dengan kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang dijamin serta dilindungi konstitusi. Seni mural jalanan sebagai saluran partisipasi politik non-formal dirasa merupakan wadah yang tepat bagi masyarakat untuk mengekspresikan berbagai kepentingannya secara visual yang sudah seharusnya menjadi ruang bagi kebebasan masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya.

Bagaimana seniman jalanan mengonsepan serta memikirkan secara matang agar isi dan makna dari karya tersebut tersampaikan kepada sesuai dengan makna yang sesungguhnya menjadi salah satu tantangan dari bagaimana mereka memainkan fungsi perlawanan terselubung melalui seni mural jalanan. Menyampaikan kritik dan menyuarakan pendapat

masyarakat melalui seni visual tidak lepas dari perlawanan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Perlawanan terselubung termasuk ke dalam strategi dari gerakan sosial baru dengan mendorong perlawanan namun tanpa menantang secara langsung pihak yang dikritik. Walaupun begitu, gerakan ini tetap berisiko bagi para partisipannya dan mengalami berbagai tindak represi dan penentangan dari pihak berwenang. Tindakan pembungkaman yang dilakukan oleh aparat kepada seniman jalanan yang mengekspresikan kekecewaan melalui seni visual sudah terjadi lebih dari 1 dekade lalu di Kota Solo dan Yogyakarta.

KESIMPULAN

Dalam fenomena mural jalanan sebagai medium perlawanan dan media mengkritisi, negara wajib memberikan kebebasan dan jaminan keamanan bagi warga negaranya seperti yang sudah diatur dalam ICCPR No. 34 mengenai kebebasan berekspresi masyarakat. Seni yang memiliki definisi luas dan bias membutuhkan pemahaman dan penafsiran dari penikmat atau publik yang melihat hasil karya seninya. Sebab merupakan suatu hal yang wajar apabila seni bergesekan dengan politik, sehingga

diperlukan adanya respon konstruktif dan tidak agresif dari pemerintah dan aparat.

Permasalahan mengenai sikap pemerintah dan aparat yang cenderung represif terhadap suara dan masukan dari masyarakat perlu dikaji ulang sebab sebagai pelayan publik, pemerintah wajib memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Masyarakat yang mulai merasa resah akan keterbatasan mereka dalam menyuarakan pendapat mengakibatkan eksistensi seni jalanan sebagai media penyaluran aspirasi meningkat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya kerja sama yang baik antara seniman jalanan dan kepolisian mengenai lokus produksi mural, graffiti, ataupun seni jalanan lainnya di tiap-tiap wilayah sehingga tidak adanya standar ganda berdasarkan makna dari seni jalanan itu sendiri. Peraturan tertulis dapat disertakan dengan jelas dan lengkap pada Perda setempat.
2. Sebagai negara yang menjunjung tinggi sistem demokrasi, pemerintah wajib untuk mengimplementasikan

apa yang sudah tertulis pada undang-undang HAM Pasal 71 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik No. 34 mengenai jaminan kebebasan berekspresi warga negara selama perbuatan masyarakat tidak menyinggung lambang atau simbol negara yang sudah tertuang pada undang-undang No. 24 tahun 2009.

3. Perlu adanya pengkajian ulang terhadap penangkapan seniman mural yang dianggap melakukan pencemaran nama baik dalam menyampaikan suaranya, sebab terdapat perbedaan yang tegas antara pencemaran nama baik dan perusakan atau pencoretan dinding fasilitas umum yang telah dilarang dalam Perda setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsanti, Riski 2013. *Daily Politics Seniman Mural di Yogyakarta*. Yogyakarta: Lumbung Pustaka.
- Creswell, John W. 1994. *Research design : qualitative & quantitative approaches*. Thousand Oaks, Calif. :Sage Publications,
- KSPPM. 2009. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara (Pertama)*.

Gajah Mada University Press.

- KET. 2016. *Street Art, The Best Urban Art from Around the World*. London: Michael O'Mara Books Limited.
- Melucci, A., Keane, J., & Mier, P. 1989. *Nomads of the present: Social movements and individual needs in contemporary society*. London: Hutchinson Radius.
- Power, Thomas., Eve Warbuton. 2021. *Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi*. Yusof Ishak Institute.
- Schacter, R. 2008. *An Ethnography of Iconoclasm: an Investigation into the Production Consumption and Destruction of Street-art in London*. *Journal of Material Culture*, 13(1):35.
- Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Haven: Yale University Press.
- Setiadijaya, Barlan. 1992. *Merdeka Atau Mati di Surabaya 1945*. Widyaswara Kewiraan. Jakarta.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Törnquist, O. 2009. *Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia*. Power Conflict Democracy Publication.
- Urry, John. 2017. Sosiologi Ruang dan Tempat. *Jurnal Kajian Ruang Sosial Budaya*, 1(1):17-35.

Jurnal

- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. 2020. Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4), 505–526.

<https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>

Budaya, I., Nilai, D. A. N., Demokrasi, M., & Ibrahim, O. 2010. *DEMOKRATISASI (Ikhtiar Budaya dan Nilai Menuju Demokrasi). III(1)*, 1–9.

Candra, N. M. T., Nugroho, W. B., & Punia, I. N. 2017. (1 C.E.). Produksi Ruang Sosial melalui Mural di Kota Denpasar. *Sorot, 1*, 1–13. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/30961>

Harjanto, Rudy., Setiawan Sabana. 2013. Graffiti sebagai Pengisi Ruang Komunikasi Simbolik Seni Jalanan Masyarakat Urban. 413.

Pramana, Gede Indra., Azhar Irfansyah. 2020. *Street Art* sebagai Komunikasi Politik: Seni, Protes, dan Memori Politik. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*.

Siahaan, H. 1999. Anarki Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi Di Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(3)*, 60–70.

Farida, E. (2022). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *Qistie, 14(2)*, 39. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>

Gian, F. X., Lambertus, B., Bupu, A., Mite, M. Y., & Nels, M. (2022). *DILEMA INPUT DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA PADA MASA KRISIS (STUDI FENOMENA MURAL PADA MASA PANDEMI COVID 19) THE DILEMMA OF INPUT IN THE INDONESIAN POLITICAL SYSTEM DURING THE CRISIS TIME (STUDY OF MURAL PHENOMENA IN THE PANDEMIC. 6(2)*, 159–174.

Sugiyanto, B. A. W., Zahra, L., & Suranto, F. (2020). Penolakan NYIA dalam Dinding Kota (Analisis Geo-Semiotik pada Jembatan Amarta Yogyakarta). *Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia, 1(1)*, 19. <https://doi.org/10.22146/jmki.51193>

The Economist Intelligence Unit. 2021. Democracy Index 2020 In Sickness and in health? *The Economist Intelligence Unit, 69*.

Warbuton, E., E. Aspinall. 2019. Explaining Indonesia's Democratic Regression : Structure, Agency, and Popular Opinion. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs 41(2)*:85-255. <https://www.muse.jhu.edu/article/732138>.

Internet

Amnesty International. 2021. *Kebebasan Berkekspresi: 404 not found*. <https://www.amnesty.id/kebebasan-berkekspresi-404-not-found/> (diakses pada 7 Januari 2022)

CNN Indonesia. *Seniman Lekra, Besar dan Terhapus dari Sejarahnya Sendiri*. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150929200551-241-81689/seniman-lekra-besar-dan-terhapus-dari-sejarahnya-sendiri> (diakses pada 18 Januari 2023)

Elvita. 2019. *Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia: Kondisi Hak Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019*. YLBHI. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/laporan-pemantauan-ylbhi-dan-16-lbh-indonesia-kondisi-hak-berekspresi-dan-menyampaikan-pendapat-di-indonesia-2019/> (diakses pada 28 November 2021)

Sardini, Nur Hidayat. 2020, 24 September.
BAB 5 Perspektif Gerakan Sosial &
Politik Baru [Video].

<https://www.youtube.com/watch?v=1FKPwaOReAY&t=4025s>